

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK *ONLINE* (SIMPONI)  
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



**Oleh:**

**NOVITA JUMATI**

**NIM. 11202615**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2015**

## ***ABSTRACT***

In line with the development and change in management arrangement at state financial, it is required a pace and accuracy of delivery of data and information as well as easiness in depositing PNBP. This is due to the nature of PNBP is must be immediately deposited to state treasury. To answer those challenges the Ministry of Finance applies State Revenue Module Generation 2 (MPN G-2) as improvement of MPN by publishing technical guidance of MPN G-2 issued by Sub Directorate of State Revenue, Directorate General of Budget. This MPN G-2 contains billing system of PNBP which is known with Online PNBP Information System (SIMPONI).

Method used in this research was qualitative method with formal evaluation approach which was intended to yield trusted and valid information regarding policy result based on policy program has been set formally by the policy maker with assumption that objective and goal have been set formally were an exact measure to see the success of a policy. Qualitative research with formal evaluation approach was expected could yield in-depth description regarding State Revenue Module of G-2 as a program policy which became the benchmark in running SIMPONI at Tidore Island City Land Office as well as to discover constraints encountered in its implementation, based on data derived during the research took place.

Result of this research are the use of SIMPONI at Tidore Islands City Land Office has met all requirements started from account activation up to PNBP deposit, thus the implementation of SIMPONI at Tidore Islands City Land Office has in conformity with MPN G-2 procedure. Constraints encountered are unstable internet connection, limited PNBP deposit time, misinterpretation of NTPN, other constraints such as electricity network outage, lack of human resources and electronic equipment malfunction. Efforts to solve the constraints were for unstable internet network, it will be sought for additional of internet network power, for the deposit conducted until 12.00, that it can be deposited in the next day, as long as it does not exceed the expiry limit namely three days since the billing code was issued, for NTPN misinterpretation, if there is a number which is hard to be distinguished or read then can be directly asked to teller and rewrite the NTPN number.

***Key Words:*** System Information of PNBP Online (SIMPONI), State Revenue Module G-2.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Implementasi Kebijakan.....	11
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	20
3. Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).....	27
B. Kerangka Pemikiran.....	32
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kota Tidore Kepulauan.....	41
B. Profil Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan.....	45
C. Gambaran Umum Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan.....	54
D. Instansi Yang Berkaitan Dengan SIMPONI.....	61
E. Jenis PNBP Yang Berlaku Di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan.....	67

BAB V: KESESUAIAN PENERAPAN SIMPONI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DENGAN PROSEDUR MPN G-2	
A. Sosialisasi SIMPONI Sebagai Bagian Dari MPN G-2.....	71
B. Tata Cara Penggunaan SIMPONI di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan.....	75
C. Analisis Kesesuaian SIMPONI dengan Prosedur MPN G-2.....	87
BAB VI: KENDALA YANG DIHADAPI DALAM IMPLEMENTASI SIMPONI	
A. Koneksi Jaringan Yang Tidak Stabil.....	97
B. Pembatasan Waktu Penyetoran di Bank.....	98
C. Kesalahan Penafsiran NTPN.....	99
D. Kendala-Kendala Lainnya.....	99
E. Upaya Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi.....	100
BAB VII : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Membangun negara diperlukan suatu anggaran yang sangat besar. Pelaksanaannya tercermin dalam pos-pos belanja negara yang dibiayai sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).<sup>1</sup> Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut maka diperlukan pendapatan negara, dimana pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan semua pendapatan negara baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak ini dikenal dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

Terdapat tiga bidang utama dalam kebijakan fiskal di tahun 2014 yaitu kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan negara terdiri dari Pajak, Hibah dan PNBP. PNBP merupakan salah satu jenis penerimaan yang berpotensi dalam penyelenggaraan APBN. Di tahun 2014, realisasi PNBP mencapai Rp. 129.248,600 miliar atau 33,4 persen dari target dalam APBNP tahun 2014.

Hal ini didukung dengan fakta bahwa penerimaan dari sektor PNBP mengalami peningkatan yang positif. Oleh karena itu pencatatan

---

<sup>1</sup> [www.kemenkeu.go.id/pdf.Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran. 2014](http://www.kemenkeu.go.id/pdf.Laporan%20Pemerintah%20Tentang%20Pelaksanaan%20Anggaran%20Pendapatan%20Dan%20Belanja%20Negara%20Semester%20Pertama%20Tahun%20Anggaran.2014). Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses tanggal 15 Desember 2014 Pukul 09.40 WIB.

PNBP yang akurat dan akuntabel sangat diperlukan untuk menunjang potensi PNBP dan untuk menjamin akuntabilitas APBN. Karena PNBP mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, maka perlu pengelolaan yang optimal. Optimalisasi pengelolaan PNBP dilakukan dengan peningkatan kualitas dalam penyusunan dan penyampaian dan laporan realisasi PNBP yang lebih realistis, akuntabel dan transparan.

Dalam rangka mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu undang-undang yang mengatur tentang PNBP yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 yang menjelaskan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,<sup>2</sup> sedangkan tentang jenis dan penyetoran PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dalam pertimbangannya menyatakan perlunya suatu peraturan atas penyetoran PNBP ke kas negara agar sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pencatatan PNBP, pemerintah telah menyelenggarakan suatu sistem untuk mengelola pencatatan PNBP yaitu sistem Modul Penerimaan Negara (MPN).<sup>3</sup> Namun pada kenyataannya efektivitas pencatatan PNBP dengan menggunakan sistem

---

<sup>2</sup> PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

<sup>3</sup> Penjelasan PMK No. 99 Tahun 2006, Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur, mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara.

MPN yang belum terintegrasi masih belum sempurna. Hal tersebut terkait dengan masih sering ditemukannya ketidaklengkapan elemen data pada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang akan ditatausahakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Ketidaklengkapan dikarenakan *human error* seperti *double input* (nominal pembayaran dan NTPN), salah dokumen pembayaran, salah kode kantor dan salah kode MAP/Akun.<sup>4</sup>

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan dalam pengaturan pengelolaan di bidang keuangan negara, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan penyampaian data dan informasi serta kemudahan dalam penyetoran PNB. Hal ini dikarenakan sifat dari PNB adalah harus segera disetorkan ke kas negara.<sup>5</sup>

Untuk menjawab kendala tersebut maka Kementerian Keuangan menerapkan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G-2) sebagai penyempurnaan dari MPN dengan menerbitkan petunjuk teknis MPN G-2 yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Penerimaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran. MPN G-2 ini terdapat sistem *billing* PNB yang dikenal dengan Sistem Informasi PNB *Online* (SIMPONI).<sup>6</sup>

Tujuan adanya SIMPONI adalah meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan dalam hal pembayaran PNB

---

<sup>4</sup> www.academia.ac.id, pdf, Endang Sumiarti dalam Rahmat Jati Waluyo, *Pencatatan PNB melalui MPN*, Laporan Akhir, Diploma III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2013. hlm. 2.

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 mengatakan bahwa Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

<sup>6</sup><https://simponi.kemenkeu.go.id>. Power Point, Sosialisasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tentang Awal Pembangunan Sistem Informasi PNB *Online* Sebagai Bagian Dari Sistem Modul Penerimaan Negara 2 (MPN 2). Diakses pada tanggal 18 desember 2014 Pukul 11.00 WIB.

yang dilakukan oleh wajib setor dalam hal ini bendahara penerimaan, meningkatnya ketersediaan dan reabilitas data PNBPN, meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PNBPN serta terciptanya sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBPN.

SIMPONI di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan dimulai pada tanggal 19 Mei 2014. Untuk mengetahui pelaksanaannya maka perlu dilakukan kajian yang terkait dengan SIMPONI dan petunjuk teknis MPN G-2. Hal ini diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar agar terciptanya penatausahaan dan pertanggungjawaban PNBPN yang berkualitas, akurat, transparan dan akuntabel untuk tercapainya tertib anggaran sesuai dengan sapta tertib pertanahan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (SIMPONI) Di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana kesesuaian penerapan SIMPONI di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan dengan prosedur MPN G-2?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMPONI ini?



### C. BATASAN MASALAH

Mengingat keterbatasan dan kemampuan peneliti serta untuk menuntun peneliti dalam rangkaian proses penelitian, agar tidak menimbulkan salah persepsi dari pihak lain, maka penelitian ini hanya dibatasi pada kesesuaian prosedur implementasi SIMPONI dengan MPN G-2 dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan SIMPONI di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan dengan prosedur MPN G-2.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SIMPONI ini.

### E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana implementasi SIMPONI di Kantor Pertanahan serta kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Menambah wawasan dalam hal sistem informasi PNBP *online* melalui penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
3. Bagi Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam rangka perbaikan dan pengendalian internal dalam rangka penatusahaan dan pengelolaan PNBP.

4. Bagi pihak lain, memberikan sumbangan pemikiran dan masukan untuk melakukan penelitian yang sejenis mengingat penelitian tentang PNBP belum banyak dilakukan. Sehingga dapat dimanfaatkan baik oleh kalangan praktisi maupun akademisi
5. Bagi masyarakat, memberikan kemudahan dalam mengakses biaya pelayanan pertanahan karena langsung mengetahui rincian biaya melalui aplikasi SIMPONI.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, sejauh yang diketahui terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian, Perguruan Tinggi. c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Metode penelitian c. Hasil Penelitian
1	2	3
1	a. Tomo HS b. 2004, Tesis, Universitas Gadjra Mada Yogyakarta c. Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan dan Perikanan d. DKI Jakarta.	a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Departemen Kelautan dan Perikanan, dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian efektivitas yang diukur melalui variabel <i>law enforcement</i> dan komitmen & kepentingan pengusaha. b. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, data primer dan data sekunder yang terdapat di Kantor Departemen. Kelautan dan Perikanan, Departemen Keuangan dan BPS Indonesia. c. Hasil penelitian dan analisis dapat dikemukakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan hasil tidak memadai yang terindikasi inkonsistensi target dan realisasi selama waktu pengamatan yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 yang menunjukkan ketidakmampuan kerja dari Dep. Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pemungutan PNBP.

Bersambung.....

Sambungan Tabel 1.

1	2	3
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Samuel Sidjabat</li> <li>b. 2009, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.</li> <li>c. Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.</li> <li>d. Kota Medan Provinsi Sumatera Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur PNBP kanwil Provinsi Sumatera Utara. Serta keakuratan pencatatan tarif PNBP berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2002 dan mengetahui tingkat keefektifan kebijakan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara.</li> <li>b. Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Dengan teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi lapangan.</li> <li>c. PP Nomor 46 Tahun 2002 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, namun yang pasti mendongkrak jumlah PNBP yang diterima untuk satu periode karena peran PP Nomor 46 Tahun 2002 sebatas controller.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Edi Wijarnako</li> <li>b. 2013, Skripsi.</li> <li>c. Analisis Prosedur Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur</li> <li>d. Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme prosedur pengelolaan PNBP pada kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur</li> <li>b. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui tinjauan lapangan dan wawancara</li> <li>c. Dalam hal pengelolaan PNBP pada Kantor Wilayah BPN Jawa Timur telah sesuai dengan mekanisme APBN</li> </ul>

Bersambung.....

Sambungan Tabel 1

4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fatmawaty Zakaria.</li> <li>b. 2013, Skripsi, Universitas Haluoleo Kendari.</li> <li>c. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango</li> <li>d. Kabupaten Bone Bolango</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2010 tentang PNBP di Kantor pertanahan Kabupaten Bone Bolango</li> <li>b. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.</li> <li>c. Menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang PNBP di Kantor Pertanahan Bone Bolango belum optimal, dimana keakuratan pencatatan meskipun telah menggunakan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan namun masih terdapat kekurangan tarif pungutan. Tingkat keefektifan kebijakan realisasi penerimaan dan realisasi belanja PNBP selama 3 tahun terakhir masih jauh dari target yang diharapkan.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Novita Jumati</li> <li>b. 2015</li> <li>c. Implementasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak <i>Online</i> (SIMPONI) Di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara</li> <li>d. Kota Tidore Kepulauan</li> <li>e. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak <i>Online</i> (SIMPONI) Di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan sudah sesuai dengan prosedur MPN G-2 serta kendalanya.</li> <li>b. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan evaluasi formal.</li> <li>c. Mekanisme implementasi SIMPONI di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan sudah sesuai dengan prosedur MPN G-2 mulai dari pendaftaran secara online hingga rekonsiliasi di KPPN. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SIMPONI adalah gangguan jaringan, kesalahan penafsiran NTPN dan pembatasan waktu pembayaran PNBPN.</li> </ul>

Sumber : Intisari Dari Berbagai Skripsi dan Tesis.

Berdasarkan tabel 1 diatas maka perbedaan dengan keempat penelitian sebelumnya adalah peneliti fokus kepada Implementasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (SIMPONI) yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/ 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan evaluasi formal, yang mana evaluasi formal ini dimaksudkan bahwa petunjuk teknis MPN G-2 menjadi acuan kinerja dalam menjalankan SIMPONI di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan petunjuk teknis MPN G-2, sebelum menggunakan SIMPONI harus dilakukan aktivasi akun satker terlebih dahulu kemudian melakukan pendaftaran/registrasi, pembuatan billing hingga pembayaran PNBPNP yaitu dengan membuat data tagihan dan mendapatkan kode billing sebelum melakukan penyetoran PNBPNP. Penyetoran PNBPNP tidak hanya melalui teller saja melainkan dapat dilakukan melalui ATM. Penggunaan SIMPONI di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan telah memenuhi semua persyaratan mulai dari aktivasi akun hingga penyetoran PNBPNP, sehingga implementasi SIMPONI di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan sudah sesuai dengan prosedur MPN G-2.

2. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi SIMPONI masih terdapat kendala yang diantaranya disebabkan oleh:

- a. Koneksi Internet yang tidak stabil.

Koneksi internet yang tidak stabil disebabkan oleh karena adanya gangguan jaringan. Gangguan ini sangat berpengaruh terhadap akses internet untuk mengoperasikan aplikasi SIMPONI. Apabila sedang

melakukan pembuatan kode billing dan jaringan KKP terputus maka harus melakukan input data kembali dan itu membutuhkan waktu.

b. Pembatasan Waktu Penyetoran PNBP.

Penyetoran PNBP dibatasi sampai pukul 12.00 WIT yang mengakibatkan sering terjadinya penumpukan penyetoran dalam satu hari kerja.

c. Kesalahan penafsiran NTPN.

Karena terdiri dari kombinasi angka dan huruf maka sering terjadi kesalahan dalam menafsirkan nomor NTPN yang mengakibatkan kesalahan dalam melakukan konfirmasi penerimaan negara di KPPN.

d. Kendala-kendala lain

Kendala lain seperti pemadaman jaringan listrik, keterbatasan sumber daya manusia dan kerusakan alat elektronik.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis terhadap pokok bahasan yang terkait dengan Implementasi SIMPONI di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, peneliti memiliki beberapa saran dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peningkatan SIMPONI di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut:

1. Dalam implementasi SIMPONI melalui sistem MPN G-2, pihak Bank/Pos Persepsi memiliki andil yang sangat besar. Oleh karena itu agar pelayanan penyetoran PNBP dapat ditambahkan waktunya hingga jam kerja di bank selesai sehingga tidak terjadi penumpukan penyetoran PNBP dalam satu



hari kerja. Kementerian Keuangan melalui KPPN agar selalu memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan sistem keuangan, karena sistem keuangan merupakan salah satu sistem yang cepat sekali berubah karena menyesuaikan tuntutan teknologi dan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di Indonesia pada umumnya dan Kota Tidore Kepulauan pada khususnya dalam melakukan penyetoran pajak kepada negara.

2. Agar Bendahara Penerimaan lebih teliti dalam menafsirkan Nomor NTPN karena menyangkut dengan konfirmasi penerimaan negara kepada Bendahara Umum Negara, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan penginputan data NTPN. Untuk itu penunjukkan Bendahara Penerimaan tidak hanya berdasarkan pada kemampuan semata namun harus pegawai yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. 2004. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aristiono, Nugroho. 2012. *Pengetahuan Ringkas Metode penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Effendi, Sofyan dan Singarimbun Masri. 1989. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nogi, Hessel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2010. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. 2013. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Tomo HS. 2004. *Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan dan Perikanan*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Rahmat Jati. 2013. *Pencatatan PNBPN melalui MPN*, Laporan Akhir, Diploma III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Jakarta: PT Buku Seru.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*, UU Nomor 20 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, UU Nomor 1 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara*, PP Nomor 22 Tahun 1997, Lembaran Negara Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997*, PP Nomor 52 Tahun 1998.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*, PP Nomor 46 Tahun 2002. , Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 2002.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*, PP Nomor 13 Tahun 2010. Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2010.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik*, PMK Nomor 32/PMK.05/2014.

### **Publikasi Departemen:**

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara. 2012. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara*, Ternate.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, 2014, *Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka*, Tidore.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, *Petunjuk Teknis Modul Penerimaan Generasi 2*, Jakarta.

**Internet:**

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). pdf. 2014. *Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran*.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

<https://simponi.kemenkeu.go.id>. Power Point, *Sosialisasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tentang Awal Pembangunan Sistem Informasi PNB Online*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.